

TESIS

**KARAKTERISTIK FINAL AND BINDING
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM KAITANNYA DENGAN POLITIK HUKUM
PEMBENTUKAN LEGISLASI YANG BAIK**



**NAMA : HERIBERTUS APRIADI
No. Mhs : 135202045/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015**

TESIS

**KARAKTERISTIK *FINAL AND BINDING*
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM KAITANNYA DENGAN POLITIK HUKUM
PEMBENTUKAN LEGISLASI YANG BAIK**



NAMA : HERIBERTUS APRIADI
No. Mhs : 135202045/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : HERIBERTUS APRIADI
Nomor Mahasiswa : 135202045/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Karakteristik *Final and Binding* Putusan Mahkamah
Konstitusi Dalam Kaitannya Dengan Politik Hukum
Pembentukan Legislasi Yang Baik

Nama Pembimbing

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Tanggal

12/1/15

Tanda Tangan




Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

12/1/15



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Nama : HERIBERTUS APIADI
Nomor Mahasiswa : 135202045/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Karakteristik *Final and Binding* Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitannya Dengan Politik Hukum Pembentukan Legislasi Yang Baik

Nama Pengaji	Tanggal	Tanda Tangan
Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum (Ketua)	23/1/15	
Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum (Anggota)	22/1/15	
Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum. (Anggota)	22/1/15	

Ketua Program Studi


Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heribertus Apriadi

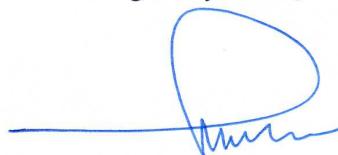
No. Mahasiswa : 135202045

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan judul *Karakteristik Final And Binding Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitannya Dengan Politik Hukum Pembentukan Legislasi Yang Baik* merupakan asli hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi.
2. Tesis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain, kecuali atas arahan dosen pembimbing.
3. Seluruh informasi yang dimuat dalam tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebutkan nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya, dan dicantumkan dalam daftar pustaka,

Yogyakarta, 09 Januari 2015

Yang Menyatakan,



Heribertus Apriadi

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis karakteristik *Final and Binding* putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga menganalisis relevansi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses pembentukan legislasi yang baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah politik hukum. Dalam penelitian ini diketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang *final and binding* tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Pasal 24C UUD 1945 mengakibatkan tidak adanya mekanisme untuk menguji putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus dengan indikasi *judicial corruption*. Berkaitan dengan karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak selalu patuh pada undang-undang dan hukum acara. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya putusan-putusan yang tidak sesuai dengan karakteristik dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yaitu dengan menjadikan dirinya sebagai positif legislator dan membuat putusan yang berlaku surut. Relevansi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses pembentukan legislasi yang baik yaitu pembentuk undang-undang tidak memiliki upaya yang kuat dalam hal pembaharuan undang-undang setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Pembentuk undang-undang tidak memberikan skala prioritas terhadap undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci : Karakteristik *Final and Binding*, Mahkamah Konstitusi, positif Legislator, Legislasi.

ABSTRACT

This study aimed to examine and analyze the characteristic of the final and binding decision of the constitutional court. This study also examined the relevance of constitution court sentence with the formation of good legislation. This is a normative legal research using legal policy approach. This research indicated that any legal effort cannot be taken for final and binding sentence. Article 24C of the 1945 Constitution resulted the absence of a mechanism to test constitutional court sentence that terminated with an indication of judicial corruption. Related to the characteristic of the constitution court sentence, the constitutional court does not always obey the law and procedural law. This can be seen by the existence of sentence which are not in accordance with the characteristic of the constitutional court sentence itself, that is to establish itself as a positive legislator and make a sentence retroactive. Relevance of constitutional court sentence with the formation of good legislation, legislators did not have strong effort to dealing with reformation of law after the constitutional court sentence. Legislators did not give priority to the law which was canceled by the constitutional court.

Keywords: Final and Binding Characteristic, The Constitutional Court, Positive Legislator, The Legislation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, bimbingan, serta karunia dan kuasa-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Karakteristik *Final and Binding* Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitannya Dengan Politik Hukum Pembentukan Legislasi Yang Baik. Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat kesarjanaan strata dua (S2) pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segenap dukungan dan bimbingan, baik selama proses studi maupun proses penyusunan tesis ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. R. Maryatmo, MA, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Parnawa Putranta, MBA., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, memberi pencerahan pemikiran serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah berkenan menjadi narasumber dan berbagi pengetahuan dengan penulis.

6. Bapak Refly Harun, S.H., M.H., LLM., mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah berkenan menjadi narsumber.
7. Bapak/Ibu dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Terima kasih kepada orang tua tercinta Bapak Jumadi (alm) dan Ibu Maria Dia atas cinta kasih dan dedikasi yang besar selama proses perjalanan kehidupan penulis, serta kepada mertua penulis Bapak Rus Suratno dan Ibu Robaniyatun atas dukungannya selama ini.
9. Terima kasih kepada istri tercinta Novi Amalia Ratna, S.H., dan kedua malaikat kecil penulis, Gladys Alvinda Justicia dan Ganesha Aldrick Gavriel Abdala yang telah memberikan dukungannya selama ini.
10. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Angkatan september 2013, atas motivasi, kritik, saran yang sangat mendukung dan tentunya pemikiran visioner, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, sehingga segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis

Heribertus Apriadi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah dan Konsep.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	16
F. Tujuan Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	19
A. Tinjauan Pustaka.....	19
1. Karakteristik <i>Final and Binding</i> Putusan Mahkamah Konstitusi...	19
a. Karakteristik.....	19
b. <i>Final and Binding</i>	21
c. Putusan.....	22
d. Mahkamah Konstitusi.....	24
2. Politik Hukum Pembentukan Legislasi Yang Baik.....	28
a. Politik Hukum	28
b. Pembentukan Legislasi	31
B. Landasan Teori	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Metode Analisis Data.....	42
F. Prosedur Penalaran.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi	45
1. Mahkamah Konstitusi.....	45
2. Wewenang dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi	48
3. <i>Judicial Review</i>	49
4. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	54
5. Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi	56
B. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat.....	56
1. Sejarah dan Perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat.....	56
2. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.....	63
3. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat	64
4. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat	68
5. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat	71
6. Proses Legislasi.....	74
C. Putusan <i>Final and Binding</i> Mahkamah Konstitusi	80
1. Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi	90
a. <i>Negative Legislator</i>	90
b. Tidak Berlaku Surut (<i>non retroaktif</i>).....	94
2. Jenis Amar Putusan Mahkamah Konstitusi	97
a. Amar Putusan Dikabulkan	97
b. Amar Putusan Ditolak	98
c. Amar Putusan Tidak Dapat Diterima <i>(Niet Ontvankelijk Verklaard)</i>	99
D. Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Legislasi Yang Baik.....	100

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang..	100
2. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Meminimalisir <i>Judicial Review</i>	106
a. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik	108
d. Teori Legislasi.....	112
3. Korelasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Legislasi..	113
4. Politik Hukum Pembentukan Legislasi Yang Baik.....	116
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang Sampai Dengan Tanggal 10 Desember 2014	53
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Alur Pembentukan Undang-Undang	75
Gambar 2	Alur Pembentukan Undang-Undang Oleh DPR	76
Gambar 3	Alur RUU inisiatif Presiden kepada DPR	77
Gambar 4	Alur Pembahasan RUU Dua Tingkat	78

